



LATAR BELAKANG KEMENANGAN PARTAI KONSERVATIF (BORIS JOHNSON) PADA PEMILU INGGRIS TAHUN 2019

Mella Hudzaifa

hudzaifa84@gmail.com

Muharjo

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta

muharjo.msi@gmail.com

Abstract

The victory of the Conservative party (Boris Johnson) in the 2019 British election is very interesting considering that the chairman of the Conservative party has resigned from the position of Prime Minister of the UK twice in 2017 and 2019. In addition, the chairman of the party, Boris Johnson, is a controversial figure, racist, and rumors of infidelity are exposed. But in the 2019 election the Conservative party (Boris Johnson) still managed to get a majority of the vote. For this reason, this journal aims to find factors that support the victory of the Conservative party (Boris Johnson) with the theory of voter behavior and with qualitative descriptive methods. As a result, the Conservative party's success was motivated by party management and party leaders in responding to and processing issues currently being faced by British society, such as Brexit, health, and crime. In addition, the Conservative party also has loyal voters who come from middle class voters. Johnson's success in offering policies on these issues, especially Brexit, has caused working class voters to also choose Conservative party.

Key word : Conservatives, Borish Johnson, Brexit, UK

Abstrak

Kemenangan partai Konservatif (Boris Johnson) pada pemilu Inggris tahun 2019 sangat menarik karena mengingat ketua partai Konservatif telah mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Inggris dua kali pada tahun 2017 dan 2019. Selain itu ketua partainya yaitu Boris Johnson merupakan sosok yang kontroversial, rasis, dan terkuaknya rumor perselingkuhan. Tetapi pada pemilu tahun 2019 partai Konservatif (Boris Johnson) tetap berhasil memperoleh mayoritas suara. Untuk itu Jurnal ini bertujuan untuk mencari faktor yang mendukung kemenangan partai Konservatif (Boris Johnson) dengan teori perilaku pemilih dan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya kemenangan partai Konservatif dilatarbelakangi oleh manajemen partai dan ketua partainya dalam merespon dan mengolah isu-isu yang sedang dihadapi oleh masyarakat Inggris seperti *Brexit*, kesehatan, dan kejahatan. Selain itu partai Konservatif juga memiliki pemilih yang setia yang berasal dari pemilih kelas menengah. Keberhasilan Johnson dalam menawarkan kebijakan terhadap isu-isu tersebut terutama *Brexit* menyebabkan pemilih dari kelas pekerja juga memilih partai Konservatif ini. Kata Kunci : Konservatif, Boris Johnson, *Brexit*, Inggris





Pendahuluan

Partai Konservatif merupakan partai yang memang sedang memimpin Inggris bahkan sejak tahun 2010. Partai ini berhasil melanggengkan kekuasaanya meskipun ketua partainya berkali-kali mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Inggris, seperti pada tahun 2017 dan tahun 2019. Pada tahun 2017, David Cameron mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Inggris sehingga terpilihlah Theresa May yang merupakan ketua partai Konservatif selanjutnya menjadi Perdana Menteri Inggris melalui pemilu Inggris tahun 2017. Tetapi pada tiga tahun masa jabatannya, Theresa May juga mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Inggris, tepatnya pada tahun 2019.

Pasca mundurnya May, partai Konservatif segera melakukan pemilihan internal partai untuk memilih ketua partai. Boris Johnson terpilih dengan persentase suara diterima 66,4 persen dan berhasil mengungguli koleganya Jeremy Hunt yang hanya memperoleh suara 33,6 persen. (UK Parliament 2019, <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn01366/>). Tanggal 23 Juli 2019 diumumkan, Johnson resmi terpilih menjadi ketua partai politik Konservatif. Hasil ini menjadikan Johnson sebagai ketua Partai Konservatif terpilih dan akan mengikuti Pemilihan Umum Inggris tahun 2019.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson atau yang lebih dikenal dengan Boris Johnson memulai karirnya dalam dunia jurnalistik, yaitu menjadi wartawan pada industri surat kabar *The Times* di London pada tahun 1987. Namun ia dipecat karena terbukti memalsukan pernyataan narasumber. Setahun setelah itu, Johnson mulai bekerja untuk *The Daily Telegraph* sebagai koresponden dengan liputan khusus *European Community* pada tahun 1989 hingga tahun 1994. Di tahun yang bersamaan Johnson juga menjadi seorang politik kolumnis untuk *The Spectator* hingga diangkat sebagai editor





majalah tersebut hingga tahun 2005. Karir Johnson dalam dunia jurnalistik membentuknya menjadi sosok yang *Euroskeptis* (kritik terhadap integrasi Eropa) dan kerap melontarkan kritik keras terhadap European Union (EU) atau Uni Eropa (UE) melalui tulisannya. Johnson juga pernah mempublikasikan artikel yang bernuansa rasis sensitif dan menyinggung pembacanya. Hal ini dapat memecah pendapat dan memicu kontroversi sehingga menimbulkan pandangan negatif terhadap Johnson. Pada karir politik Johnson, ia pernah diberhentikan dari jabatan Shadow Arts Minister atau menteri seni bayangan partai Konservatif karena kemunculan rumor perselingkuhannya dengan seorang jurnalis pada tahun 2004.

Keberhasilan kemenangan partai Konservatif yang dipimpin oleh Boris pada pemilu Inggris tahun 2019 menarik untuk diteliti mengingat ketua Partai Konservatif sudah berulang kali mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Inggris dan sosok Boris Johnson sebagai ketua partai merupakan orang yang kontroversial, rasis, dan tersandung isu perselingkuhan namun tetap berhasil terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris pada tahun 2019.

Sistem Pemilu dan Kepartaian di Inggris

Pemilihan umum di Inggris dilakukan 5 tahun sekali dengan tujuan untuk memilih parlemen lokal atau *Member of Parliament* (MP). Perdana Menteri tidak dipilih langsung oleh masyarakat Inggris melainkan melalui pemilihan parlemen lokal tersebut. Terdapat 650 daerah pemilihan yang disebut dengan konstituensi di seluruh wilayah Inggris. Penyebarannya adalah 533 konstituensi di England, 40 konstituensi di Wales, 59 konstituensi di Skotlandia, dan 18 konstituensi di Irlandia Utara. Hasil akhirnya yang menjadi Perdana Menteri adalah partai yang berhasil memperoleh





mayoritas suara dari 650 konstituensi. Artinya dibutuhkan minimal 326 suara untuk memenangkan pemilu di Inggris.

Sistem yang digunakan pada pemilu di masing-masing konstituensi yaitu *single member constituency with simple majority* atau juga dikenal dengan *the first-past-the-post-system*. Hasil dari pemilihan ini adalah masing-masing konstituensi memenangkan satu nama dengan satu partai atau independen yang berhasil memperoleh suara tertinggi dan nantinya akan menjabat sebagai MP. Keseluruhan MP yang berjumlah 650 orang juga akan menjabat di *House of Commons*. Partai politik yang memenangkan mayoritas suara, ketua partainya akan menjadi Ketua *House of Commons* dan sekaligus menjadi Perdana Menteri Inggris.

Calon MP yang mengikuti pemilu diusung oleh partai atau independen. Terdapat banyak partai di Inggris seperti Partai Konservatif, Partai Buruh, Partai Nasional Skotlandia, Partai Liberal Demokrat, *Democratic Unionist Party*, Sinn Fein, Plaid Cymru, *Green Party*, dan partai-partai yang lainnya. Masing-masing partai menganut ideologi dan arah kebijakan masing-masing dan memiliki pemilih yang setia. Tetapi pada setiap pemilu di Inggris partai yang berhasil memperoleh mayoritas suara yaitu hanya partai Konservatif dan partai Buruh, sehingga tidak jarang Inggris disebut menganut sistem dwi partai atau *dwi party system*.

Kerangka Teori

Kerangka Teori yang digunakan untuk mengalisa permasalahan tersebut adalah teori Perilaku Pemilih menurut Angus Campbell, Philip E. Converse, Warren E. Miller dan Donald E. Stokes dalam





buku *The American Voters*, yang menyatakan bahwa perilaku individu dalam memilih suatu partai atau calon pemimpin dipengaruhi oleh 3 (tiga) variabel (Campbell, 1993 : 8-13), yaitu :

1. Identifikasi terhadap partai. Secara psikologis individu memilih suatu partai karena adanya rasa kesetiaan dan cintanya terhadap partai. Paham ideologi yang dianut juga mempengaruhi tiap-tiap individu untuk memilih dan biasanya para pemilih juga sudah mengenal serta mencintai ideologi tertentu sejak masih dini karena pengaruh ajaran keluarga yang sudah turun menurun.
2. Memanfaatkan isu yang sedang berkembang. Para pemilih memilih partai yang mereka anggap layak memimpin pemerintahan kelak dan dapat memecahkan berbagai persoalan-persoalan dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Orientasi terhadap kandidat. Variabel ini mengacu terhadap pertimbangan individu yang memilih kandidat, tanpa memandang partai yang mendukungnya ataupun pada isu-isu yang sedang berkembang. Perilaku individu ini dalam memilih kandidat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu: pertama, kualitas instrumental yakni tindakan yang diyakini para pemilih akan direalisasikan oleh kandidat jika kelak terpilih dalam pemilu; kedua, kualitas simbolis, yakni kualitas kepribadian seseorang yang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, ketaatan terhadap norma dan aturan, kebaikan serta kematangan diri yang kesemuanya diinginkan oleh para pemilih.

Dalam menganalisa faktor yang menjadi kemenangan partai Konservatif dalam pemilu Inggris pada tahun 2019 hanya digunakan variabel 1 dan variabel 2. Sedangkan variabel ke-3 dianggap kurang relevan karena orientasi terhadap kandidat yaitu Boris Johnson itu sendiri dinilai memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut dapat dilihat dari banyaknya isu kontroversial Johnson





yang muncul, mulai dari adanya pernyataan rasis Johnson dalam tulisannya bahkan rumor perselingkuhannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Melalui metode ini, data diperoleh dari berbagai literatur bersifat apa adanya yang selanjutnya dikompilasi, dipilah, dikategorisasi, diinterpretasi, dan juga dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil berupa gambaran fakta yang ada untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diajukan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan data-data sekunder yang terdiri buku-buku literatur serta memanfaatkan data-data melalui situs-situs internet dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan untuk penelitian. Teknik analisis dan pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif. Setelah semua data dikumpulkan, data-data tersebut disusun dan dianalisis untuk menggambarkan situasi yang relevan atas fakta. Hasil akhir dari penelitian dapat ditarik dari penghubungan antar variabel yang ada, menginterpretasikannya dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pemilu Inggris 2019

Pemilu Inggris 2019, dilaksanakan pada tanggal 12 Desember tahun 2019. Boris Johnson mengikuti pemilihan pada salah satu daerah pemilihan di England yaitu konstituensi Uxbridge and South Ruislip. [Hasilnya Johnson memenangkan konstituensi ini dengan perolehan jumlah suara](#)

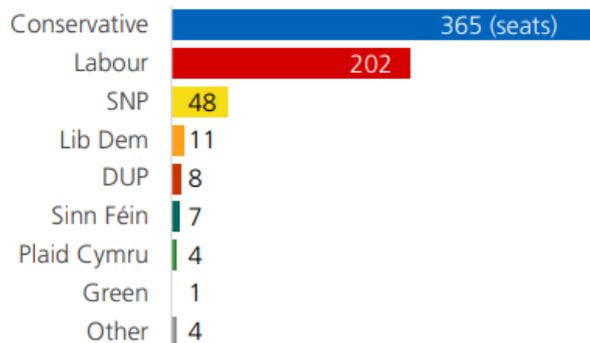




[25.351 atau sekitar 52,6 persen dan mengalahkan rivalnya Ali Milani dari Partai Buruh yang hanya mendapat suara 18.141 atau sekitar 37,6 persen. \(UK Parliament 2019, <https://members.parliament.uk/member/1423/electionresult>\)](#) . Hasil akhir dari pemilu Inggris diumumkan tanggal 13 Desember setelah seluruh konstituensi selesai menghitung suara dan melaporkan MP yang terpilih pada konstituensi tersebut. Hasilnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1

Grafik Data Hasil Pemilihan Umum Inggris 2019



Sumber : House of Commons Library. 2020. "General Election 2019 : full result and analysis". <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8749/>, diunduh pada tanggal 5 Februari 2021.





Dari grafik di atas dapat dilihat yang berhasil memperoleh mayoritas suara adalah Partai Konservatif dengan mendapatkan 365 suara. Di urutan kedua ada Partai Buruh dengan mendapatkan 202 suara. Di urutan ketiga ada Partai Nasional Skotlandia dengan mendapatkan 48 suara. Di urutan keempat ada Partai Liberal Demokrat dengan mendapatkan 11 suara, dan selanjutnya partai-partai minoritas seperti *Democratic Unionist Party* 8 suara, Sinn Fein 7 suara, Plaid Cymru 4 suara, Green Party 1 suara, dan yang lainnya 4 suara. Artinya partai Konservatif mutlak memenangkan pemilu ini dan menjadikan ketua partainya Boris Johnson menjadi Perdana Menteri Inggris terpilih dengan masa jabatan 5 tahun ke depan.

Identifikasi Partai Konservatif

Perpolitikan di Inggris dipengaruhi dengan pentingnya kelas sosial. Dimana masing-masing kelas memiliki kebiasaan dalam memilih partai pada pemilu Inggris. *National Readership Survey* (NRS) membagi kelas sosial di Inggris dalam 6 kategori yaitu A, B, C1, C2, D, dan E. Keseluruhan kategori dikelompokkan ke dalam dua kelas yaitu ABC1 dan C2DE. ABC1 merupakan kelompok kelas menengah dan kelompok C2DE merupakan kelompok kelas pekerja. Masing-masing kelas memiliki kebiasaan kecenderungan dalam memilih partai pada setiap pemilu di Inggris. Kelas menengah memiliki kecenderungan untuk memilih partai Konservatif dan kelas pekerja cenderung untuk memilih partai Buruh.

Salah satu alasan untuk menjelaskan hubungan erat antara kelas sosial dan perilaku memilih adalah persamaan historis dalam kebijakan partai. Konservatif memiliki tradisi menyukai pajak yang rendah dan mengurangi dukungan kesejahteraan. Jenis kebijakan ini menarik bagi orang kaya di kelas





sosial A/B yang kurang bergantung pada negara. Sebaliknya kelas buruh mendukung kebijakan yang mendistribusikan kembali kekayaan atau memberikan dukungan yang lebih besar. Misalnya, pajak yang lebih tinggi untuk orang yang lebih kaya dan pengeluaran yang lebih tinggi untuk negara kesejahteraan. Kebijakan ini menarik bagi pemilih yang kurang mampu di kelas sosial D/E. (Bbc.co.uk. 2017, <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zd9bd6f/revision/4>)

Tetapi pada praktiknya, pada setiap pemilu di Inggris, kebijakan yang ditawarkan oleh calon Perdana Menteri Inggris harus menyesuaikan dengan isu-isu yang sedang dihadapi oleh masyarakat Inggris. Oleh sebab itu tidak jarang terjadi perubahan loyalitas pada masing-masing kelas terhadap partainya. Kesetiaan masing-masing kelas terhadap partai harus dilihat dari data pemilu Inggris yang sebelumnya. Dalam hal ini dijelaskan data persentase pilihan berdasarkan kelas sosial di Inggris pada 3 pemilu terakhir yaitu tahun 2015, 2017, dan 2019.

Tabel 2
Persentase Pilihan Berdasarkan Kelas Sosial pada
Pemilu Inggris 2015, 2017, dan 2019

	P.Konservatif (%)	P.Buruh (%)
2015		
ABC1	45	26
C2DE	27	41
2017		
ABC1	44	40
C2DE	44	42
2019		
ABC1	43	33





C2DE	48	33
------	----	----

Sumber : Rowena Hamal (2015), YouGov (2017), YouGov (2019), diolah.

Pada tahun 2015, terlihat jelas bahwa kelas sosial sangat mempengaruhi cara masyarakat memilih dalam pemilihan umum. Terlihat ada perbedaan yang signifikan antara pemilih dari kelas menengah yang lebih cenderung untuk memilih partai Konservatif yang berjumlah 45 persen, sedangkan memilih partai Buruh hanya 26 persen. Sebaliknya kelompok kelas pekerja cenderung untuk memilih partai Buruh sebanyak 41 persen dan hanya 27 persen yang memilih partai Konservatif.

Pada pemilihan umum tahun 2017, terdapat perubahan yang cukup jelas pada persentasi kelas sosial dalam memilih partainya, dimana partai Konservatif terlihat menang dari kedua kelas dan menyentuh angka yang sama yaitu 44 persen baik dari kelas menengah maupun dari kelas pekerja. Tetapi jika dilihat dari pemilih kelas menengah, mayoritasnya masih memilih partai Konservatif yaitu 44 persen dan 40 persen memilih partai Buruh. Meskipun hanya selisih 4 persen, secara keseluruhan mayoritas kelas menengah masih memilih partai Konservatif. Jika dilihat dari partai Buruh, suara mayoritas masih berasal dari pemilih kelas pekerja yaitu 42 persen dan menerima 40 persen dari pemilih kelas menengah. Data tersebut memperlihatkan perbedaan persentase yang tidak terlalu jelas antara loyalitas kelas terhadap partainya.

Pada pemilihan tahun 2019, juga terjadi perbedaan dimana partai Konservatif tetap menang dari kedua kelas, tetapi mayoritasnya berasal dari kelas pekerja yaitu 48 persen, bahkan mengungguli 5 persen dari suara kelas menengah yang hanya 43 persen. Tetapi jika dilihat dari pemilih kelas menengah, mayoritasnya masih memilih partai Konservatif dengan 43 persen dan hanya 33 persen





memilih partai Buruh. Artinya mayoritas pemilih kelas menengah tetap setia kepada partai Konservatif, tetapi yang mengalami perubahan yaitu loyalitas pemilih kelas pekerja kepada partai Buruh.

Keadaan ekonomi dan struktur sosial Inggris yang sepenuhnya berbeda, hal ini mempengaruhi loyalitas pemilih kelas kepada partai dan cenderung untuk menjauhi basis kelas tersebut. Istilah yang diberikan untuk gerakan menjauh dari pemungutan suara berbasis kelas adalah *dealignment*. Proses *dealignment* ini terjadi karena adanya faktor isu tunggal yang sedang dihadapi Inggris yaitu *Brexit*. *Brexit* menjadi isu tunggal yang sangat berpengaruh dalam pemilihan umum Inggris sehingga menyebabkan adanya pergeseran loyalitas pemilih terutama kelas pekerja terhadap partainya terutama pada pemilu tahun 2017 dan 2019.

Referendum yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 dengan pertanyaan “*Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?*”, menghasilkan sebanyak 51,9 persen masyarakat Inggris memilih untuk meninggalkan dengan *vote leave*, dan 48,1 persen memilih untuk tetap tinggal di UE dengan *vote remain*. (Elise Uberoi 2016, <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7639/CBP-7639.pdf>). Sejak saat itu, pemerintah harus segera menyelesaikan proses *Brexit* sebagai bentuk keinginan mayoritas masyarakat Inggris.

Keberpihakan kelas pekerja terhadap partai Konservatif karena partai ini memiliki keinginan yang kuat untuk segera menyelesaikan *Brexit*. Hal ini berbanding terbalik dengan partai Buruh yang menginginkan adanya referendum ulang mengenai keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Mayoritas kelas pekerja menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa dimana pada referendum tersebut sebanyak





64 persen dari kelas pekerja memilih *leave* dan hanya 36 persen yang memilih *remain*. (Statista 2016, <https://www.statista.com/statistics/518395/Brexit-votes-by-social-class/>)

Kemenangan partai Konservatif dalam pemilu Inggris tahun 2019 berdasarkan faktor identifikasi terhadap partai ditemukan adanya pemilih partai yang setia yaitu yang berasal dari pemilih kelas menengah. Selain itu mayoritas kelas pekerja juga memilih partai Konservatif yang disebabkan karena adanya pandangan yang sama mengenai proses *Brexit*.

Manajemen Partai Konservatif (Boris Johnson) Terhadap Isu Yang Sedang Berkembang Di Inggris

Brexit

Brexit merupakan isu utama dalam setiap pemilihan umum di Inggris sejak tahun 2015. Hal ini disebabkan karena terpilih atau mundurnya Perdana Menteri Inggris berdasarkan pandangannya terhadap *Brexit* ini, termasuk pemilu tahun 2019. Johnson sebagai ketua partai Konservatif memiliki pandangan terhadap *Brexit* yaitu ingin segera menyelesaikan *Brexit* yang dapat dilihat dari slogan kampanyenya yaitu “*Get Brexit Done!*”.

Kebijakan yang ditawarkan Johnson untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa termuat dalam *the great new deal*. Johnson memberikan perubahan atas perjanjian yang ditawarkan oleh Perdana Menteri sebelumnya agar perjanjian ini dapat menarik perhatian dan diterima oleh masyarakat Inggris. Poin pentingnya yaitu mengenai *Irish Backstop* dan *Political Declaration*. (Josh Holder 2019, <https://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2019/oct/18/how-much-johnson-great-new-deal-actually-new>).





Irish Backstop merupakan protokol perbatasan antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. Johnson mengajukan penghapusan *Irish Backstop* tersebut dan menawarkan skema perpindahan barang dan masyarakat antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia di perbatasan tidak dikenai tarif bea cukai dan tidak ada larangan bagi perpindahan penduduk yang berdagang. Tetapi dalam praktiknya perpindahan barang tersebut boleh dilakukan jika barang tersebut memang benar-benar ditujukan kepada masing masing negara bukan dengan tujuan untuk mengirim ke negara ketiga, seperti England, Wales, maupun Skotlandia.

Political Declaration atau Deklarasi politik yang merupakan dokumen yang berisikan kerangka kerja sama masa depan antara Inggris dan UE jika Inggris sudah resmi keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Mengenai ini Johnson mencerminkan adanya ambisi Pemerintah Inggris untuk melakukan kerjasama yang ambisius, luas, dan mendalam serta fleksibel di dalam bidang perdagangan dan ekonomi dengan UE. Johnson juga menambahkan penekanan untuk dapat menghormati otonomi masing-masing dalam struktur pengambilan keputusan. Johnson menambahkan pernyataan bahwa pengaturan perselisihan tidak lagi diatur oleh *European Court of Justice* (ECJ) jika tidak terkait dengan interpretasi hukum UE. Selain itu, kedepannya dimana kesepakatan-kesepakatan akan diselesaikan dalam masa transisi dengan memperhatikan internal kedua belah pihak dengan mempertimbangkan penerapan aspek hubungan masa depan sebelum masa transisi berakhir. (Institute for Government 2020, [relationshiphttps://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/Brexit-deal-political-declaration](https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/Brexit-deal-political-declaration))

Kesehatan





Keadaan pelayanan kesehatan Inggris (*National Health Service*) atau NHS terus turun setiap tahunnya. NHS *funding* mengemukakan fakta bahwa adanya peningkatan permintaan di NHS karena populasi Inggris yang juga meningkat serta jumlah pasien dengan kondisi kronis dan penyakit yang komplikasi juga terus meningkat. (NHS funding 2019, <https://nhsfunding.info/nhs-crisis-making/>) Permintaan ini juga diiringi dengan meningkatnya inflasi setiap tahunnya dan banyak fasilitas kesehatan yang membutuhkan pemeliharaan. Oleh sebab itu NHS sedang mengalami krisis pendanaan untuk memenuhi permintaan.

Atas permasalahan tersebut, Johnson menawarkan kebijakan untuk meningkatkan dana Investasi kepada NHS yang mencapai 33.9 miliar poundsterling pada tahun 2023-2024. Dana investasi yang dimaksudkan bertujuan untuk meningkatkan pembaruan 20 rumah sakit dengan 850 juta poundsterling, dan membangun 6 rumah sakit baru dengan 2.7 juta poundsterling. Selain itu terdapat 78 rumah sakit terpercaya akan menerima peralatan pendeteksi kanker, seperti alat MRI (*Magnetic Resonance Imaging*), CT scan (*Computerised Tomography*) dan mamografi sebagai bentuk upaya menekan angka kematian yang disebabkan oleh kanker. (Conservatives.com 2019, <https://www.conservatives.com/our-priorities/nhs>)

[Permasalahan lainnya yang sedang dihadapi oleh NHS yaitu kekurangan staf kerja NHS khususnya Perawat. Kekurangan ini disebabkan karena](#) setelah referendum dilakukan, sekitar 7.000 perawat yang berasal dari UE sudah meninggalkan Inggris. Kedua gaji yang diberikan kepada perawat tidak sinkron dengan inflasi. Ketiga shift panjang dan tidak fleksibel menyebabkan perawat menderita secara mental dan fisik. Keempat beasiswa bagi mahasiswa perawat dihapuskan sehingga mengurangi minat untuk menjadi perawat di Inggris. (Matt Farrah 2019,





<https://www.nurses.co.uk/blog/95-of-nurses-say-patient-health-is-at-risk-and-it-s-due-to-nhs-staff-shortages/>

Atas permasalahan ini, Johnson menjanjikan penambahan 50.000 perawat baru melalui pemberian beasiswa keperawatan bagi masyarakat Inggris yang disertai dengan penempatan setelah lulus dan mempermudah bagi perawat asing untuk tinggal dan bekerja di Inggris. Selain itu karir perawat di Inggris juga akan dipastikan kesejahteraannya oleh Johnson dengan peningkatan gaji dan pemberian intensif yang sesuai. (Nurses.co.uk. editorial team 2019, <https://www.nurses.co.uk/blog/tories-pledge-50000-more-nurses-to-bring-back-student-bursaries-and-1bn-extra-on-social-care/>).

Kejahatan

Tingkat kriminalitas Inggris yang terus meningkat setiap tahunnya. Terutama pada jenis kejahatan dengan kekerasan seperti perampokan yang disertai dengan ancaman pembunuhan menggunakan benda tajam seperti pisau, botol kaca bekas, dan yang lainnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat Inggris karena tujuannya korbannya adalah kaum muda dan bagi mereka yang berjalan sendirian. Oleh sebab itu, Johnson sebagai calon Perdana Menteri Inggris 2019 harus memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Inggris tersebut.

Kebijakan yang ditawarkan oleh Boris Johnson yaitu melalui penambahan 20.000 anggota kepolisian bertujuan untuk mengamankan jalan dan memastikan jalan aman agar masyarakat yang berjalan sendirian terasa aman dan nyaman. Selain itu Johnson juga memperpanjang *stop and research* yang merupakan wewenang yang diberikan kepada kepolisian untuk menggeledah seseorang atau kendaraan yang dicurigai membawa obat-obatan ilegal, senjata, harta curian, dan





sesuatu benda yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan seperti linggis atau yang lainnya. (Gov.UK n.d, <https://www.gov.uk/police-powers-to-stop-and-search-your-rights>).

Bagi para pelaku kejahatan Johnson berjanji akan memberikan hukuman yang lebih berat bagi dan mempercepat dakwaan yang sebelumnya dalam hitungan minggu. Penguatan hukuman ini dengan memperpanjang masa tahanan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan kejahatan lagi setelah selesai menjalani masa hukuman. Johnson juga berjanji untuk memperkuat Badan Kejahatan Nasional (*National Crime Agency*) dan membuat Kejahatan Siber Nasional baru (*National Cyber Crime force*). (Tony Blair 2019, <https://institute.global/policy/uk-general-election-2019-crime-and-justice>).

Kesimpulan

Pemilu Perdana Menteri Inggris tahun 2019 yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2019 untuk memilih calon *Member of Parliament* pada 650 konstituensi. Dalam mempengaruhi pandangan masyarakat, masing-masing kandidat dan Partai akan berkampanye dengan cara mengangkat isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat Inggris. Isu-isu tersebut mempunyai peran penting dalam Pemilu Perdana Menteri Inggris kali ini.

Pada akhirnya, Partai Konservatif berhasil meraih suara mayoritas dengan perolehan 365 suara. Hal ini menjadikan ketua partainya yaitu Boris Johnson berhasil menduduki kursi Perdana Menteri Inggris. Kemenangan partai Konservatif ini merupakan fenomena yang luar biasa mengingat ketua partai ini pada tahun 2017 dan 2019 telah mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Inggris. Selain itu keberhasilan Boris Johnson menjadi Perdana Menteri Inggris juga hal yang sangat





mencengangkan mengingat pribadi Johnson yang sering tersandung kasus kontroversial, rasial dan adanya rumor perselingkuhan.

Kemenangan partai Konservatif ini disebabkan karena keberhasilan partai dan ketua partai dalam mengolah isu-isu yang sedang dihadapi oleh masyarakat Inggris terutama isu *Brexit*. *Brexit* merupakan isu utama dan sangat mendominasi pada pemilihan ini. Johnson merupakan sosok yang sangat keras dan sangat menginginkan untuk membawa Inggris agar keluar dari Uni Eropa. Hal ini sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat Inggris yang dapat dilihat dari hasil referendum tahun 2016. Selain itu Partai Konservatif memiliki pemilih yang setia yaitu pemilih yang berasal dari kelas menengah. Hal ini disebabkan karena adanya kesamaan historis antara kelas dengan kebijakan partai. Tetapi pada pemilihan 2019 kali ini, kelas pekerja pun juga lebih memilih partai Konservatif karena mayoritas dari kelas pekerja juga menginginkan *Brexit*, yaitu sebanyak 64 persen.

Selain *Brexit* yang menjadi isu utama, isu kesehatan dan keamanan juga mempengaruhi pandangan pemilih terhadap partai. Manajerial terhadap isu berkembang yang dikemukakan Johnson lebih tepat sasaran dan Johnson juga menjelaskan langkah dan upaya yang jelas serta konkrit dalam menghadapi isu tersebut sehingga menambah kepercayaan masyarakat akan Johnson dan partai Konservatif ini.

Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa, meskipun ketua partai Konservatif sudah dua kali mundur dari jabatan Perdana Menteri Inggris dan ketua partainya yaitu Boris Johnson tersandung kasus yang kontroversial namun partai Konservatif yang diketuai oleh Boris Johnson mampu meraih kemenangan dalam Pemilu Inggris tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan adanya kecenderungan masyarakat Inggris untuk memilih pemimpinnya berdasarkan bagaimana manajerial partai dan





individu tersebut dalam menghadapi isu yang sedang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat Inggris dan isu *Brexit* merupakan hal yang utama.

Daftar Pustaka

Buku

Campbell, Angus dkk. 1976. *The American Voters*. The University of Chicago Press, Chicago.

Hammal, Rowena. 2015. *How to use 2015 general election examples in exam questions*. Philip Allan for Hodder Education, UK.

Terbitan Berkala

Uberoi, Elise. 2016. "European Union Referendum 2016." <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7639/CBP-7639.pdf>, diunduh pada tanggal 4 April 2021

Website Internet





- Blair, Tony. 2019. "UK General Election 2019: Crime and justice". <https://institute.global/policy/uk-general-election-2019-crime-and-justice>, diakses pada tanggal 10 September 2021.
- Curtis, Chris. 2017. "How Britain voted in at the 2017 general election". <https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2017/06/13/how-britain-voted-2017-general-election>", diakses pada tanggal 10 November 2021.
- Curtis, Cris. 2019. "How Britain voted in the 2019 general election". <https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2019/12/17/how-britain-voted-2019-general-election>", diakses pada tanggal 10 November 2021.
- Conservatives.com. 2019. "Strengthening our NHS". <https://www.conservatives.com/our-priorities/nhs>, diakses pada tanggal 6 September 2021.
- Farah, Matt. 2019. "95% of Nurses say patient health is at risk (and it's due to NHS staff shortages)" <https://www.nurses.co.uk/blog/95-of-nurses-say-patient-health-is-at-risk-and-it-s-due-to-nhs-staff-shortages/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2021.
- Gov.UK. n.d. "Police powers to stop and search: your rights" <https://www.gov.uk/police-powers-to-stop-and-search-your-rights>, diakses pada tanggal 7 Setember 2021.
- Holder, Josh. 2019. "How much of Johnson's 'great new deal' is actually new?" <https://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2019/oct/18/how-much-johnson-great-new-deal-actually-new>, diakses pada tanggal 5 September 2021.
- Institute for Government. 2020. "Brexit deal: Political Declaration on future UK-EU relationship" <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/Brexit-deal-political-declaration>, diakses pada tanggal 5 September 2021.
- NHS funding. 2019. "Is the NHS crisis of our own making?" <https://nhsfunding.info/nhs-crisis-making/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2021.
- Nurses.co.uk.editorial team. 2019. "Tories pledge 50,000 more nurses, to bring back student bursaries and £1bn extra on social care" <https://www.nurses.co.uk/blog/tories-pledge-50000-more-nurses-to-bring-back-student-bursaries-and-1bn-extra-on-social-care/>, diakses pada tanggal 6 September 2021.
- Statista. 2016. "Brexit votes in the United Kingdom by social class 2016". <https://www.statista.com/statistics/518395/brexit-votes-by-social-class/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2021.
- UK Parliament. 2019. "Leadership Elections: Conservative Party". <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn01366/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021.





Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>

P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: 2829-1778

<https://doi.org/10.31315/>



UK Parliament. 2019. “Rt Hon Boris Johnson MP”
<https://members.parliament.uk/member/1423/electionresult>, diakses pada tanggal 30 Maret 2021.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).